

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

Perusahaan manufaktur di subsektor makanan dan minuman menjadi objek pada penelitian ini. Data sekunder dalam penelitian ini bersumber dari laporan tahunan periode 2020–2024 perusahaan-perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, yang diperoleh dari *Bloomberg* dan situs web resmi Bursa Efek Indonesia di www.idx.co.id. Data yang digunakan yaitu terkait kepemilikan institusional, komisaris independen, kepemilikan manajerial dan penghindaran pajak.

Sampel penelitian dipilih menggunakan teknik *purposive sampling* yang dijelaskan pada bab sebelumnya, yaitu menetapkan kriteria tertentu guna memastikan bahwa sampel tersebut sesuai dengan tujuan dan sasaran penelitian. Di bawah disajikan tahapan penentuan data terpilih berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.

Tabel 4.1 Hasil Seleksi Sampel Penelitian

No	Kriteria	Jumlah
1	Perusahaan bidang makanan dan minuman yang terdaftar di BEI Tahun 2020 – 2024.	103
2	Perusahaan yang tidak melakukan <i>Initial Public Offering</i> (IPO) atau terdaftar di BEI sebelum tahun 2020.	(14)
3	Perusahaan bidang makanan dan minuman yang tidak melaporkan laporan tahunan di Bursa Efek Indonesia tahun 2020 – 2024.	(18)
4	Perusahaan yang tidak mempunyai laba positif selama periode penelitian tahun 2020 – 2024.	(38)

No	Kriteria	Jumlah
5	Perusahaan yang laporan keuangannya tidak disajikan dalam mata uang rupiah (IDR).	(2)
6	Perusahaan yang tidak memiliki kelengkapan variabel-variabel yang dibutuhkan dalam penelitian yaitu kepemilikan institusional (X1), komisaris independen (X2), kepemilikan manajerial (X3) dan <i>tax avoidance</i> yang terdiri dari total laba sebelum pajak dan pajak terkini sebagai variabel dependen (Y).	(12)
Jumlah sampel yang memenuhi kriteria		19
Tahun pengamatan		5
Data <i>outlier</i>		16
Total Data		79

Sumber : Data sekunder diolah peneliti, 2026

Tabel 4.1 menunjukkan hasil data studi dengan ketentuan yang telah diterapkan, yakni terdapat 19 entitas manufaktur sub sektor makanan dan minuman di Bursa Efek Indonesia selama tahun 2020-2024, penerapan teknik *purposive sampling* menghasilkan total data awal sebanyak 95 observasi ($N = 95$), namun setelah eliminasi 16 data yang teridentifikasi *outlier*, sampel akhir dalam penelitian ini berjumlah 79 observasi. Data *outlier* didefinisikan sebagai observasi yang memiliki nilai ekstrim dan karakteristik menyimpang secara substansial dari pola umum data dalam suatu penelitian (Ghozali, 2021). Keberadaan data *outlier* berpotensi mengakibatkan distribusi data tidak memenuhi asumsi normalitas, sehingga perlu dilakukan eliminasi berdasarkan hasil identifikasi grafik *box plot*.

4.2 Analisis Data

Aplikasi IBM SPSS 25 digunakan untuk analisis data dalam penelitian ini. Analisis data terdiri atas 4 komponen, yaitu hasil analisis statistik deskriptif, uji asumsi klasik, uji analisis regresi berganda dan uji hipotesis.

4.2.1 Analisis Statistik Deskriptif

Penelitian menggunakan deskriptif analisis untuk menjabarkan statistika deskriptif variable penelitian. Hasil analisis statistik deskriptif mencakup total sampel, nilai minimum, nilai maksimum, *mean*, varians, dan deviasi standar yang menggambarkan karakteristik distribusi data setiap variabel (Ghozali, 2021). Statistik deskriptif merupakan data penelitian yang terdiri dari variabel penelitian selama periode pengamatan. Berikut *output* statistik deskriptif analisis dalam studi ini.

Tabel 4.2 Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kepemilikan Institusional	79	0.01	0.92	0.3611	0.30394
Komisaris Independen	79	0.29	0.60	0.3745	0.06245
Kepemilikan Manajerial	79	0.00	0.90	0.2312	0.26947
Penghindaran Pajak	79	0.17	0.31	0.2216	0.02991
Valid N (listwise)	79				

Sumber : Data sekunder diolah peneliti, 2026

Tabel 4.2 menunjukkan variabel kepemilikan institusional memiliki nilai minimum sebesar 0,01 dan nilai maksimum sebesar 0,92. Nilai rata-rata (*mean*) variabel ini tercatat sebesar 0,3611 dengan deviasi standar sebesar 0,30394. Nilai deviasi standar yang lebih kecil dari nilai rata-rata mengindikasikan bahwa data kepemilikan institusional terdistribusi relatif homogen di sekitar nilai rata-ratanya.

Variabel komisaris independen memiliki nilai minimum sebesar 0,29 dan nilai maksimum sebesar 0,60. Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif, nilai rata-rata (*mean*) variabel ini tercatat sebesar 0,3745 dengan deviasi standar sebesar 0,06245. Data mengenai komisioner independen tersebar secara cukup merata di sekitar nilai rata-ratanya dengan nilai standar deviasi lebih kecil daripada nilai rata-ratanya.

Variabel kepemilikan manajerial memiliki nilai minimum sebesar 0,00 dan nilai maksimum sebesar 0,90. Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif, nilai rata-rata (*mean*) variabel ini tercatat sebesar 0,2312 dengan deviasi standar sebesar 0,26947. Nilai deviasi standar yang lebih besar dari nilai rata-rata mengindikasikan bahwa data kepemilikan manajerial terdistribusi cukup heterogen, mencerminkan adanya variasi relatif tinggi antar observasi.

Tax avoidance memiliki nilai minimum sebesar 0,17 dan nilai maksimum sebesar 0,31. Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif, nilai rata-rata (*mean*) variabel dependen ini tercatat sebesar 0,2216 dengan deviasi standar sebesar 0,02991. Nilai deviasi standar yang jauh lebih kecil dari nilai rata-rata mengindikasikan bahwa data *tax avoidance* terdistribusi relatif homogen, mencerminkan tingkat variasi yang rendah antar observasi.

4.2.2 Uji Asumsi Klasik

Penelitian ini menggunakan model regresi linear berganda, sehingga uji asumsi klasik perlu dilakukan agar mengonfirmasi model regresi pada penelitian terbebas dari gangguan yang dapat memengaruhi keandalan *output* estimasi.

Pengujian asumsi klasik yang diterapkan dalam penelitian ini meliputi uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas.

4.2.2.1 Uji Normalitas

Untuk memastikan apakah residu dalam model regresi terdistribusi secara normal, dilakukan uji normalitas yaitu sebagai salah satu syarat yang wajib terpenuhi sebelum analisis regresi linear berganda dapat diterapkan. Jika distribusi residual diketahui normal, maka residual penelitian dianggap baik dan layak untuk digunakan. Salah satu cara untuk mengetahui distribusi residual penelitian yaitu menggunakan uji *Kolmogrov Smirnov*. Nilai signifikan yang digunakan adalah 0,05. Apabila nilai signifikansi $> 0,05$ dengan demikian residual dinyatakan tersebar normal, sedangkan apabila nilai signifikansi $< 0,05$ dengan demikian residual dinyatakan tidak tersebar normal (Ghozali, 2021).

Setelah dilakukan pengobatan autokorelasi menggunakan metode Cochrane–Orcutt, jumlah observasi berkurang menjadi 78 sehingga pengujian asumsi klasik, termasuk uji normalitas, dilakukan kembali untuk memastikan bahwa model regresi akhir tetap memenuhi asumsi yang dipersyaratkan. Pada penelitian ini, pengujian normalitas dilakukan menggunakan *One Sample Kolmogorov–Smirnov Exact Test (Monte Carlo)* dengan taraf signifikansi sebesar 5% (0,05). Penggunaan *Exact Test (Monte Carlo)* dipilih karena metode ini menghasilkan estimasi nilai signifikansi secara *exact* melalui simulasi *Monte Carlo*, sehingga dapat memberikan estimasi yang lebih akurat dibandingkan pendekatan asimtotik pada kondisi tertentu (PUZA, 2015). Dasar pengambilan keputusan mengacu pada nilai Exact Sig. (2-tailed), yaitu apabila nilai signifikansi lebih besar

dari 0,05 maka residual dinyatakan berdistribusi normal, sedangkan apabila nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka residual dinyatakan tidak berdistribusi normal.

Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			
			Unstandardized Residual
N			78
Normal Parameters ^{a,b}	Mean		0.0000000
	Std. Deviation		0.11868065
Most Extreme Differences	Absolute		0.133
	Positive		0.133
	Negative		-0.073
Test Statistic			0.133
Asymp. Sig. (2-tailed)			0.002 ^c
Monte Carlo Sig. (2-tailed)	Sig.		0.116 ^d
	99% Confidence Interval	Lower Bound	0.108
		Upper Bound	0.124

Sumber : Data sekunder diolah peneliti, 2026

Tabel 4.3 menunjukkan hasil pengujian normalitas menggunakan *One Sample Kolmogorov Smirnov Exact Test (Monte Carlo)* menunjukkan nilai sebesar 0,116. Nilai tersebut lebih besar dari taraf signifikansi 0,05 ($0,116 > 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa residual model regresi berdistribusi normal. Dengan demikian, asumsi normalitas telah terpenuhi sehingga model regresi layak digunakan untuk pengujian hipotesis selanjutnya..

4.2.2.2 Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas menurut Ghazali (2021) digunakan untuk menentukan apakah variabel-variabel independen dalam suatu model regresi saling

berkorelasi. Seharusnya tidak ada korelasi antara variabel-variabel independen dalam model regresi yang baik. Multikolinearitas dalam penelitian ini diidentifikasi dengan menganalisis data *Variance Inflation Factor* (VIF) dan nilai *tolerance*. Berikut disajikan hasil uji multikolinearitas dalam penelitian ini.

Tabel 4.4 Hasil Uji Multikolinearitas

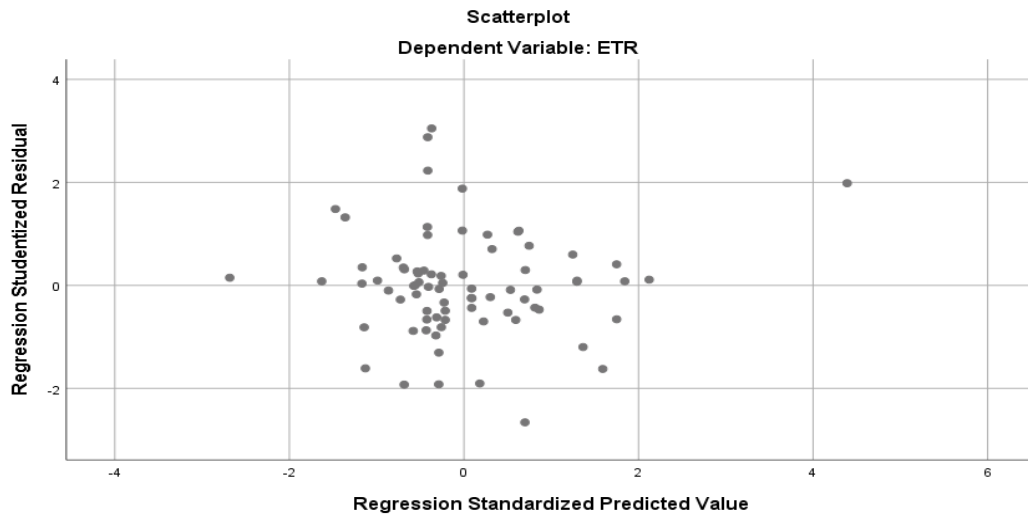
Coefficients ^a				Kesimpulan
Model		Collinearity Statistics		
		Tolerance	VIF	
1	Kepemilikan Institusional	0.999	1.001	Tidak terjadi multikolinearitas
	Komisaris Independen	0.959	1.043	Tidak terjadi multikolinearitas
	Kepemilikan Manajerial	0.960	1.042	Tidak terjadi multikolinearitas

Sumber : Data sekunder diolah peneliti, 2026

Tabel 4.5 menunjukkan nilai VIF yang diperoleh untuk variabel kepemilikan institusional adalah sebesar 1,001, komisaris independen sebesar 1,043, dan kepemilikan manajerial sebesar 1,042. Angka *tolerance* pada variabel kepemilikan institusional sebesar 0,999; angka *tolerance* pada variabel komisaris independen sebesar 0,959; dan angka *tolerance* pada variabel kepemilikan manajerial sebesar 0,960. Berdasarkan nilai VIF pada tiap variabel studi yakni lebih kecil dari 10 dan nilai *tolerance* lebih besar dari 0,10; hasil tersebut menunjukkan bahwa seluruh variabel independen telah memenuhi kriteria bebas multikolinearitas, sehingga model regresi dinyatakan layak untuk digunakan.

4.2.2.3 Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas berguna untuk mengkaji terjadinya perbedaan varian dari residual dari beberapa pengamatan. Homoskedastisitas merujuk pada kondisi di mana varians residual antar pengamatan bersifat konstan, sedangkan heteroskedastisitas terjadi ketika varians residual tersebut bervariasi secara tidak konsisten. Model regresi bisa juga dikatakan baik jika model tersebut tidak mengalami heteroskedastisitas atau homoskedastisitas. Uji heteroskedastisitas dalam penelitian ini dilakukan menggunakan metode *scatterplot*, yakni dengan mengamati grafik plot antara nilai prediksi variabel dependen (ZPRED) dan nilai residual (SRESID). Heteroskedastisitas dapat dideteksi dengan mengamati ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot*, seperti pola yang melebar, menyempit, atau mengumpul di sekitar titik tengah. Apabila terdapat pola tersebut maka terjadi heteroskedastisitas. Apabila sebaran titik pada grafik menyebar secara acak di sebelah kanan maupun kiri angka 0 pada sumbu horizontal maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Berikut ini hasil pengujian heteroskedastisitas pada gambar dibawah ini:



Gambar 4.1 Scatterplot

Sumber : Data sekunder diolah peneliti, 2026

Berdasarkan grafik *scatterplot* pada gambar di atas, titik-titik data tersebar secara acak di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y tanpa membentuk pola tertentu. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan bebas dari gejala heteroskedastisitas.

Selain menggunakan metode *scatterplot*, penelitian ini juga melakukan pengujian heteroskedastisitas menggunakan uji Glejser untuk memberikan bukti statistik terhadap hasil pengujian visual. Uji Glejser dilakukan dengan meregresikan nilai absolut residual (*ABSRESID*) terhadap masing-masing variabel independen. Menurut Ghozali (2021), model regresi dinyatakan tidak mengalami gejala heteroskedastisitas apabila nilai signifikansi masing-masing variabel independen lebih besar dari 0,05. Hasil uji Glejser pada penelitian ini disajikan pada Tabel 4.6. Oleh karena itu, pengujian menggunakan uji Glejser digunakan sebagai pendukung dalam memastikan terpenuhinya asumsi homoskedastisitas.

Tabel 4.5 Hasil Uji Glejser

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	0.072	0.039		1.829	0.071
	Kepemilikan Institusional	-0.018	0.038	-0.054	-0.470	0.640
	Komisaris Independen	0.055	0.162	0.041	0.343	0.733
	Kepemilikan Manajerial	0.015	0.043	0.041	0.347	0.729

Sumber : Data sekunder diolah peneliti, 2026

Tabel 4.6 menunjukkan bahwa variabel Kepemilikan Institusional memiliki nilai signifikansi sebesar 0,640, variabel Komisaris Independen sebesar 0,733, dan variabel Kepemilikan Manajerial sebesar 0,729. Seluruh nilai signifikansi tersebut lebih besar dari taraf signifikansi 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala heteroskedastisitas pada model regresi. Hasil uji Glejser tersebut sejalan dengan hasil analisis scatterplot yang menunjukkan penyebaran titik secara acak tanpa membentuk pola tertentu. Oleh karena itu, model regresi dalam penelitian ini memenuhi asumsi homoskedastisitas dan layak digunakan untuk pengujian hipotesis.

4.2.2.4 Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi menurut Ghozali (2021) digunakan dalam mendeteksi ada tidaknya korelasi antara residual dalam suatu periode dengan residual pada periode sebelumnya pada model regresi linear. Uji autokorelasi dilakukan menggunakan statistik *Durbin-Watson* sebagai bagian dari prosedur analisis regresi linear berganda yang digunakan dalam penelitian ini. Ketentuan pengambilan keputusan

pada uji autokorelasi, apabila data pada nilai *Durbin-Watson* memenuhi kriteria $du < dw < 4-du$ (Ghozali, 2021). Berikut hasil uji autokorelasi pada penelitian ini.

Tabel 4.6 Hasil Uji Autokorelasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0.126 ^a	0.016	-0.023	0.13215	1.230

Sumber : Data sekunder diolah peneliti, 2026

Berdasarkan hasil tabel 4.6, menunjukkan hasil DW test sebesar 1,230. Diketahui dari tabel *Durbin-Watson* didapatkan nilai du sebesar 1,714 (lampiran). Berdasarkan hasil tersebut, model regresi terindikasi mengandung gejala autokorelasi karena nilai Durbin-Watson sebesar 1,230 berada di bawah nilai du sebesar 1,714, sehingga tidak memenuhi kriteria bebas autokorelasi yang disyaratkan, yakni $du < dw < 4-du$. Menurut Ghozali (2021) salah satu cara untuk mengobati model regresi yang mengalami gejala autokorelasi adalah dengan melakukan transformasi data melalui metode *Cochrane-Orcutt* yaitu memanfaatkan nilai estimasi residual pada model awal untuk memperoleh informasi nilai koefisien autokorelasi (ρ atau rho). Nilai rho (ρ) tersebut kemudian digunakan untuk mentransformasikan variabel independen maupun variabel dependen ke dalam bentuk variabel selisih umum.

Tabel 4.7 Hasil Uji Autokorelasi (Metode *Cochrane-Orcutt*)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	0.235 ^a	0.055	0.017	0.12106	2.081

Sumber : Data sekunder diolah peneliti, 2026

Berdasarkan tabel 4.7, hasil yang diperoleh setelah melakukan transformasi menggunakan metode *Cochrane-Orcutt*, menunjukkan hasil DW test sebesar 2,081.

Uji ini menggunakan tabel Durbin-Watson dengan tiga variabel bebas ($k=3$), ukuran sampel sebesar 78, dan tingkat signifikansi sebesar 5%. Tabel tersebut menunjukkan bahwa nilai d_L dan d_U masing-masing adalah 1,5535 dan 1,7129. Karena $d > d_U$, dapat dikatakan bahwa tidak terdapat autokorelasi positif. Jika $4-d$ hasilnya adalah 1,919 dan $(4-d) > d_U$, menunjukkan tidak adanya autokorelasi negatif. Nilai $d_U < d < (4 - d_U)$ menunjukkan bahwa model regresi tidak mengandung autokorelasi positif maupun negatif. Oleh karena itu, asumsi bebas autokorelasi telah terpenuhi.

4.2.3 Analisis Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda adalah metode statistik yang dioperasikan dalam menggambarkan pola keterkaitan dengan dua atau lebih variabel melalui suatu persamaan matematis. Metode analisis ini diterapkan pada penelitian yang melibatkan lebih dari satu variabel bebas dalam menjelaskan pengaruhnya terhadap satu variabel dependen. Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi arah dan tingkat signifikansi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2021). Dalam studi ini, analisis regresi linear berganda diterapkan untuk menguji pengaruh kepemilikan institusional, komisaris independen, dan kepemilikan manajerial terhadap *tax avoidance*. Berikut tabel hasil analisis regresi linear berganda pada penelitian ini.

Tabel 4.8 Hasil Regresi Linear Berganda

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-1.031	0.056		-18.456	0.000
	Kepemilikan Institusional	0.017	0.053	0.036	0.317	0.752
	Komisaris Independen	0.341	0.229	0.171	1.485	0.142
	Kepemilikan Manajerial	0.068	0.061	0.128	1.109	0.271

Sumber : Data sekunder diolah peneliti, 2026

Berdasarkan tabel 4.8 dapat dijelaskan model persamaan regresi linear berganda sebagai berikut ini.

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

$$Y = -1,031 + 0,017X_1 + 0,341X_2 + 0,068X_3 + e$$

Dari persamaan regresi diatas, maka Kesimpulan yang dapat dijelaskan Adalah sebagai berikut:

- Nilai konstan (a) bernilai negatif sebesar -1,031 memiliki arti bahwa apabila variabel kepemilikan institusional, komisaris independen dan kepemilikan manajerial, dinyatakan konstan pada tingkat nol, maka kemungkinan (kecenderungan) tingkat penghindaran pajak mengalami penurunan -1,031.
- Nilai b1 (nilai koefisien regresi X1) menunjukkan nilai positif sebesar 0,017, yang mengindikasikan bahwa setiap peningkatan satu satuan pada variabel kepemilikan institusional akan berdampak pada peningkatan nilai *tax avoidance* sebesar 0,017; dengan dugaan bahwa variabel lain tidak diteliti pada studi ini.

- Nilai b_2 (nilai koefisien regresi X_2) bernilai positif sebesar 0,341 yang menandakan bahwa komisaris independen diperoleh sebesar 0,341 dengan arah positif, yang mengandung makna bahwa pada kenaikan satu satuan variabel komisaris independen akan memengaruhi nilai penghindaran pajak sebesar 0,341; dengan dugaan bahwa variabel lain tidak diteliti pada studi ini.
- Nilai b_3 (nilai koefisien regresi X_3) bernilai positif sebesar 0,068 yang mengindikasikan bahwa setiap peningkatan satu satuan pada variabel kepemilikan manajerial akan berdampak pada peningkatan nilai *tax avoidance* sebesar 0,068; dengan dugaan bahwa penelitian ini tidak meneliti faktor-faktor lain.

4.2.4 Uji Hipotesis

Uji hipotesis digunakan dalam membuktikan hubungan variabel independen terhadap variabel dependen berdasarkan hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya. Prosedur ini hanya dapat dilaksanakan apabila model regresi memenuhi seluruh persyaratan uji asumsi klasik. Pengujian hipotesis dilaksanakan melalui tiga pendekatan statistik, yaitu koefisien determinasi (R^2) mengukur kelayakan model, uji signifikansi parsial (uji-t) mengevaluasi dampak masing-masing variabel bebas secara terpisah dan uji signifikansi simultan (uji-F) untuk mengevaluasi efek gabungan dari variabel-variabel bebas tersebut.

4.2.4.1 Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi (*R Square*) digunakan sebagai alat ukur untuk mengukur sejauh mana kontribusi variabel independen dalam menjelaskan

perubahan atau variasi yang terjadi pada variabel dependen pada suatu model regresi. Variabel independen dapat dikatakan menggambarkan seluruh informasi dari variabel dependen jika nilai koefisien determinasi semakin dekat dengan angka satu. Jika nilai koefisien determinasi jauh dari angka satu, maka menunjukkan ketidakmampuan variabel independen dalam menggambarkan informasi atas variabel dependen (Ghozali, 2021). Berikut hasil uji koefisien determinasi dalam penelitian ini.

Tabel 4.9 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0.235 ^a	0.055	0.017	0.12106

Sumber : Data sekunder diolah peneliti, 2026

Tabel 4.9 menunjukkan bahwa skor *adjusted R²* adalah sebesar 0,017 atau 1,7%. Skor tersebut mengindikasikan adanya variabel kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, dan kepemilikan manajerial secara bersama-sama mampu menjelaskan variasi *tax avoidance* sebesar 1,7%, sedangkan sisanya sebesar 98,3% dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian ini.

4.2.4.2 Uji Simultan (Uji F)

Untuk mengevaluasi validitas model regresi yang digunakan, uji F simultan bertujuan untuk menganalisis pengaruh gabungan dari semua variabel independen terhadap variabel dependen (Ghozali, 2021). Hasil uji F simultan untuk penelitian ini adalah sebagai berikut.

Tabel 4.10 Hasil Uji Simultan F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	0.063	3	0.021	1.442	0.237 ^b
	Residual	1.085	74	0.015		
	Total	1.148	77			

Sumber : Data sekunder diolah peneliti, 2026

Berdasarkan tabel 4.10 untuk hasil uji F, nilai signifikansi yang dihasilkan sebesar 0,237 lebih tinggi dari 0,05 pada tingkat signifikansi 5%, sehingga memberi gambaran bahwa model regresi kemungkinan tidak bisa dimanfaatkan untuk menjelaskan pengaruh variabel independen atas variabel dependen. Oleh karena itu, jika digabungkan, faktor-faktor seperti kepemilikan manajemen, dewan komisaris yang independen, dan kepemilikan institusional tidak berdampak signifikan terhadap penghindaran pajak.

4.2.4.3 Uji Parsial (Uji t)

Uji signifikansi parsial (uji t) dioperasikan dalam menguji sejauh mana setiap variabel independen secara individual menjelaskan varians pada variabel dependen (Ghozali, 2021). Hasil uji parsial (uji-t) untuk penelitian ini adalah sebagai berikut.

Tabel 4.11 Hasil Uji Parsial (Uji t)

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-1.031	0.056		-18.456	0.000
	Kepemilikan Institusional	0.017	0.053	0.036	0.317	0.752
	Komisaris Independen	0.341	0.229	0.171	1.485	0.142
	Kepemilikan Manajerial	0.068	0.061	0.128	1.109	0.271

Sumber : Data sekunder diolah peneliti, 2026

Berdasarkan hasil uji parsial (uji t) pada tabel diatas, dapat disimpulkan bahwa :

1. Variabel kepemilikan institusional menghasilkan nilai koefisien sebesar 0,017 dengan nilai t sebesar 0,317 dan nilai signifikansi sebesar 0,752. Karena nilai signifikansi tersebut melebihi batas toleransi 0,05 ($0,752 > 0,05$), maka H1 ditolak. Dengan demikian hal ini menunjukkan kepemilikan institusional secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.
2. Variabel komisaris independen menghasilkan nilai koefisien sebesar 0,341 dengan nilai t sebesar 1,485 dan nilai signifikansi sebesar 0,142. Karena nilai signifikansi tersebut melebihi batas toleransi 0,05 ($0,142 > 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 ditolak. Dengan demikian, komisaris independen secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.
3. Variabel kepemilikan manajerial menghasilkan nilai koefisien sebesar 0,068 dengan nilai t sebesar 1,109 dan nilai signifikansi sebesar 0,271.

Karena nilai signifikansi tersebut melebihi batas toleransi 0,05 ($0,271 > 0,05$), sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 ditolak. Hal ini berarti kepemilikan manajerial secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance.

4.3 Interpretasi Hasil

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, interpretasi mengenai pengaruh kepemilikan institusional, komisaris independen, dan kepemilikan manajerial terhadap tax avoidance dapat dijelaskan sebagai berikut:

4.3.1 Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dan uji t, hasil uji parsial (t) menunjukkan nilai t hitung positif sebesar 0,317 dengan nilai signifikansi sebesar 0,752. Nilai t hitung memiliki nilai positif artinya arah hubungan yang dihasilkan variabel kepemilikan institusional (X1) bersifat positif dan untuk nilai signifikansi diperoleh lebih besar dari taraf signifikansi 5% atau 0,05. Berdasarkan hasil studi yang telah dilakukan, kepemilikan institusional terbukti tidak ada hubungan terhadap tingkat penghindaran pajak perusahaan, artinya **H1 ditolak**. Disimpulkan bahwa perusahaan melakukan tindakan *tax avoidance* tidak dipengaruhi oleh Kepemilikan Institusional.

Kepemilikan institusional merupakan saham perusahaan oleh lembaga atau institusi yang menanamkan modalnya dalam bentuk investasi saham. Umumnya, institusi pemilik saham mendelegasikan tugas pengelolaan investasi kepada divisi khusus di dalam perusahaan. Meskipun kepemilikan institusional berkontribusi terhadap mekanisme pengawasan perusahaan, pelaksanaan pengawasan secara

langsung umumnya dilakukan oleh dewan komisaris sebagai wakil dari pemegang saham institusional. Tindakan *tax avoidance* cenderung tetap berlangsung dalam suatu perusahaan tanpa memandang ada atau tidaknya unsur kepemilikan institusional di dalamnya (Damayanti & Susanto, 2016). Oleh karena itu dapat ditarik kesimpulan bahwa besarnya proporsi kepemilikan institusional tidak menentukan tinggi rendahnya skala penghindaran pajak yang diterapkan perusahaan.

Berdasarkan teori agensi yang dikemukakan oleh Jensen & Meckling (1976), *agent* cenderung bertindak sesuai dengan kepentingannya sendiri dan tidak selalu sejalan dengan kepentingan *principal*. Pemilik perusahaan berperan sebagai *principal* sedangkan manajer berperan sebagai *agent*, sehingga perbedaan kepentingan di antara keduanya berpotensi menimbulkan konflik. Pemilik perusahaan menginginkan agar manajer mampu memaksimalkan nilai perusahaan sekaligus menjaga kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan yang berlaku. Di sisi lain, manajer selaku agen memiliki kecenderungan dalam mengutamakan pencapaian laba setelah pajak yang optimal guna memenuhi target kinerja. Perbedaan kepentingan antara pemilik perusahaan dan manajer inilah kemudian memicu timbulnya tindakan penghindaran pajak. Ketika perusahaan memperoleh keuntungan dengan pajak besar, jumlah kewajiban pajak yang harus disetorkan perusahaan juga akan bertambah. Semakin tinggi kewajiban pajak perusahaan, semakin besar insentif bagi manajemen untuk melakukan strategi efisiensi pajak melalui pemanfaatan celah peraturan perpajakan, sehingga kecenderungan melakukan penghindaran pajak yang lebih agresif.

Meskipun teori agensi menyatakan bahwa manajemen terdorong melakukan penghindaran pajak dalam mengoptimalkan laba setelah pajak, hasil penelitian ini membuktikan kepemilikan institusional tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, sehingga hipotesis yang menyatakan adanya hubungan kepemilikan institusional terhadap *tax avoidance* tidak dapat diterima. Temuan ini mengindikasikan bahwa keberadaan pemegang saham institusional belum mampu memberikan tekanan pengawasan yang cukup kuat atau bersifat pasif dalam melakukan monitoring terhadap kebijakan pajak perusahaan, sehingga tidak memberikan perbedaan perilaku terhadap penghindaran pajak.

Hasil penelitian ini didukung oleh Wizanasari (2024); Thiana dan Lubis (2024) yang menyatakan kepemilikan institusional tidak memiliki hubungan terhadap penghindaran pajak. Kepemilikan institusional adalah bagian kepemilikan saham perusahaan oleh institusi serta badan hukum, seperti pemerintah, perbankan, perusahaan asuransi, dana pensiun, serta lembaga institusional lainnya. Pemilik institusi memiliki wewenang besar dan hak untuk memonitor kinerja manajemen, pada realitasnya pihak institusi memercayakan seluruh fungsi pengawasan dan tata kelola operasional tersebut kepada dewan komisaris sebagai representasi mereka di dalam perusahaan. Akibatnya, tinggi atau rendahnya persentase kepemilikan institusional tidak berdampak langsung terhadap kebijakan perpajakan yang diambil oleh pihak manajemen, hasil tersebut menunjukkan bahwa praktik penghindaran pajak tetap dapat dilakukan perusahaan tanpa dipengaruhi oleh keberadaan maupun besarnya kepemilikan institusional dalam struktur kepemilikan perusahaan.

4.3.2 Pengaruh Komisaris Independen terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dan uji t, hasil uji parsial (t) menunjukkan nilai t hitung positif sebesar 1,485 dengan nilai signifikansi sebesar 0,142. Nilai t hitung memiliki nilai positif artinya arah hubungan variabel komisaris independen (X2) bersifat positif dan untuk nilai signifikansi yang diperoleh lebih besar dari taraf signifikansi 5% atau 0,05. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak, artinya **H2 ditolak**. Disimpulkan bahwa perusahaan melakukan tindakan *tax avoidance* tidak dipengaruhi oleh komisaris independen.

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak mempunyai keterkaitan afiliasi terhadap investor pengendali, direksi, maupun anggota dewan komisaris lainnya sehingga dapat menjalankan fungsi pengawasan secara objektif dan independen. Keberadaan komisaris independen dalam struktur tata kelola perusahaan dimaksudkan untuk menciptakan mekanisme pengawasan yang objektif dan independen terhadap kebijakan manajemen. Berdasarkan peraturan OJK, sebagai bagian dari penerapan tata kelola perusahaan yang baik, perusahaan publik diwajibkan memiliki komisaris independen dengan proporsi minimal 30% dari keseluruhan anggota dewan komisaris. Komisaris independen memiliki fungsi pengawasan untuk memastikan bahwa kebijakan strategis perusahaan, termasuk kebijakan perpajakan, dijalankan secara transparan dan akuntabel serta selaras dengan kepentingan seluruh pemangku kepentingan.

Berdasarkan teori agensi yang dikemukakan oleh Jensen & Meckling (1976), komisaris independen diharapkan mampu bertindak sebagai instrumen

pengendalian yang menjembatani konflik kepentingan antara principal selaku pemilik perusahaan dan *agent* selaku pengelola perusahaan. Komisaris independen diharapkan dapat mengawasi dan membatasi tindakan oportunistik manajer yang cenderung melakukan penghindaran pajak secara agresif demi mengoptimalkan laba setelah pajak. Adanya komisaris independen dalam struktur *corporate governance* belum terbukti dapat menghadirkan dampak yang signifikan pada praktik *tax avoidance* dalam perusahaan.

Temuan ini mengindikasikan bahwa meskipun secara teoritis komisaris independen memiliki wewenang pengawasan yang kuat, pada praktiknya fungsi tersebut belum berjalan secara optimal dalam konteks pengawasan kebijakan perpajakan. Ketidaksignifikanan pengaruh komisaris independen kemungkinan disebabkan oleh proporsi komisaris independen pada perusahaan sampel yang cenderung hanya memenuhi ketentuan minimum sebesar 30% sebagaimana diatur oleh OJK, sehingga peran mereka dalam memengaruhi proses pengambilan keputusan strategis perusahaan belum berjalan secara optimal. Penambahan atau penempatan anggota dewan komisaris independen yang hanya sekedar memenuhi persyaratan formal membuat tidak seluruh komisaris independen mampu menunjukkan independensinya secara efektif, sehingga tidak terdapat pengaruh terhadap kinerja dewan dalam melakukan pengawasan terhadap manajemen dalam melakukan tindakan *tax avoidance* (Muslim *et al.*, 2023).

Hasil penelitian ini didukung oleh Widodo & Angraini (2024); Nagara & Setiawati (2022) yang menyatakan bahwa keberadaan komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*)

perusahaan. Oleh karena itu, proporsi komisaris independen dalam struktur dewan komisaris tidak terbukti memiliki peran signifikan dalam memengaruhi tingkat agresivitas praktik *tax avoidance* yang dilakukan oleh manajemen perusahaan.

4.3.3 Pengaruh Kepemilikan Manajerial terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dan uji t, hasil uji parsial (t) menunjukkan nilai t hitung positif sebesar 1,109 dengan nilai signifikansi sebesar 0,271. Nilai t hitung memiliki nilai positif artinya arah hubungan variabel Kepemilikan Manajerial (X3) bersifat positif dan untuk nilai signifikansi yang diperoleh lebih besar dari taraf signifikansi 5% atau 0,05. Hasil pengujian menunjukkan bahwa kepemilikan manajerial tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, artinya **H3 ditolak**. Disimpulkan bahwa perusahaan melakukan tindakan *tax avoidance* tidak dipengaruhi oleh Kepemilikan Manajerial.

Persentase saham perusahaan oleh jajaran manajemen, seperti dewan direksi dan dewan komisaris disebut sebagai kepemilikan manajemen, yang memiliki kewenangan serta keterlibatan langsung dalam proses pengambilan keputusan perusahaan. Keberadaan kepemilikan manajerial dalam struktur kepemilikan perusahaan berfungsi sebagai mekanisme tata kelola yang bertujuan untuk menyelaraskan kepentingan antara manajemen selaku *agent* dan pemegang saham selaku *principal*, sehingga potensi konflik keagenan dapat diminimalkan. Kepemilikan saham perusahaan, manajer diharapkan akan bertindak lebih berhati-hati dalam setiap pengambilan keputusan strategis, termasuk keputusan terkait kebijakan perpajakan, karena manajer akan menanggung risiko dan konsekuensi finansial sebagai pemegang saham.

Berdasarkan teori agensi yang dikemukakan oleh Jensen & Meckling (1976), kepemilikan manajerial seharusnya mampu menjadi mekanisme tata kelola yang efektif dalam meredam konflik kepentingan antara *principal* dan *agent* melalui penyelarasan tujuan kedua belah pihak. Adanya kepemilikan saham oleh manajer menyebabkan manajer tidak hanya berperan sebagai pengelola perusahaan, tetapi juga sebagai pemilik perusahaan, sehingga diharapkan tercipta keselarasan kepentingan antara manajemen dan pemegang saham. Manajer sekaligus merupakan pemegang saham seharusnya lebih mempertimbangkan risiko reputasi dan hukum yang ditimbulkan dari tindakan *tax avoidance* yang agresif. *Output* studi ini mengungkapkan bahwa kepemilikan manajerial tidak berhubungan pada penghindaran pajak, yang menunjukkan bahwa kepemilikan saham oleh manajemen belum mampu memengaruhi keputusan perusahaan terkait penghindaran pajak.

Temuan studi ini mengindikasikan bahwa kepemilikan saham oleh pihak manajerial pada perusahaan sampel penelitian ini relatif kecil, sehingga belum mampu menciptakan keselarasan kepentingan yang cukup kuat antara manajer dan pemilik perusahaan. Ketika proporsi kepemilikan manajerial sangat kecil, manajer cenderung tetap bertindak sesuai kepentingan pribadinya karena dampak finansial yang ditanggungnya sebagai pemegang saham tidak cukup signifikan untuk mengubah perilaku pengambilan keputusannya (Ramadhanti *et al.*, 2025). Oleh karena itu, keberadaan maupun besarnya kepemilikan manajerial tidak terbukti memberikan perbedaan signifikan terhadap kebijakan perpajakan oleh manajemen perusahaan, termasuk yang berkaitan dengan praktik penghindaran pajak.

Hasil penelitian ini didukung oleh Saida Rahma (2024); Thiana & Lubis (2024); Ramadhanti *et al* (2025) yang menemukan bahwa kepemilikan manajerial tidak memiliki dampak signifikan terhadap praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) perusahaan. Oleh karena itu, proporsi kepemilikan manajerial tidak terbukti menjadi faktor yang menentukan tingkat agresivitas praktik *tax avoidance* perusahaan, karena keputusan perpajakan cenderung dipengaruhi oleh berbagai faktor lain, seperti tekanan untuk mencapai target laba, kondisi keuangan perusahaan, serta regulasi perpajakan yang berlaku. Oleh karena itu, kepemilikan manajerial terbukti tidak mampu membatasi tindakan *tax avoidance* pada entitas yang menjadi objek pada studi ini.